



UNIVERSITAS ANDALAS



**Evaluasi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan
Korupsi Importasi Gula Pada Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2016**

Oleh:

Salsabilla Oktafiani

2210532029

Dosen Pembimbing:

Iswardi, SE, MM, Ak, CA

NIP. 196212291992031001

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PADANG
2026**

	No. Alumni Universitas	Salsabilla Oktafiani	No. Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a) Tempat/Tanggal Lahir: Simpang Empat/ 12 Oktober 2003 b) Nama Orang Tua: M. Yassir dan Silfianti c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Departemen: Akuntansi e) No. BP: 2210532029 f) Tanggal Lulus: 09 Februari 2026 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3.78 i) Lama Studi: 3 Tahun 6 Bulan j) Alamat Orang Tua: Simpang Empat Selatan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat</p>		
<p style="text-align: center;">EVALUASI AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KASUS DUGAAN KORUPSI IMPORTASI GULA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2016</p> <p style="text-align: center;">Skripsi oleh: Salsabilla Oktafiani Dosen Pembimbing: Iswardi, SE, MM, Ak, CA</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to evaluate the process and results of the audit of state financial losses in the alleged corruption case involving sugar imports at the Kementerian Perdagangan in 2015-2016. This study uses a qualitative method with data analysis using descriptive analysis. The results of this study indicate that the audit process conducted by the BPKP was not in accordance with the investigative audit standards as stipulated in BPKP Head Regulation Number 17 of 2017 concerning Guidelines for the Management of Investigative Activities and BPKP Deputy Head Regulation Number 1 of 2024 concerning Investigative Audits. This is related to the length of time taken to fulfill requests for letters of request for calculation of state financial losses, the fact that BPKP auditors did not communicate and clarify matters with BPK auditors, and the fact that the audit did not reflect objectivity, independence, and professional accuracy. The audit results conducted by BPKP regarding the amount of state financial losses are inaccurate and do not meet the criteria for actual and definite state financial losses as required in Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 and the provisions of Article 1 point 22 of Law -Law Number 1 of 2004 on shortfalls in import duties and taxes in the context of imports (PDRI) and the high purchase prices by the Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).</i></p> <p>Keywords: <i>Audit, State Financial Losses, Corruption, Calculation of State Financial Losses</i></p>			

**EVALUASI AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA KASUS DUGAAN KORUPSI IMPORTASI GULA PADA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2016**

Oleh:

Salsabilla Oktafiani

NIM.2210532029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi importasi gula pada kementerian perdagangan tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses audit yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai dengan standar audit investigatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Audit Investigatif. Hal tersebut terkait dengan lamanya pemenuhan permintaan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara, auditor BPKP tidak melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor BPK, dan audit yang dilakukan tidak mencerminkan objektivitas, independensi serta kecermatan profesional. Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP mengenai jumlah kerugian keuangan negara tidak tepat dan belum memenuhi kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) serta kemahalan harga pembelian oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).

Kata Kunci: Audit, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dosen Pembimbing: Iswardi, SE, MM, Ak, CA